

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas dan Efisiensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik, di karenakan Badan Permusyawaratan Desa selalu mengawasi laporan tahunan APBDes yang di laporkan oleh Kepala Desa, memantau setiap hari pengeluaran dana desa dan mengawasi pembagian RASKIN/BPNT dan BLT untuk kepentingan masyarakat Desa Moteng.
2. Otoritas dan Tanggung Jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di buktikan dengan ketua beserta anggotanya sudah mengetahui apa saja kewajibannya untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Serta adanya keterangan dari masyarakat Desa Moteng.
3. Inisiatif Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat baik di buktikan dengan ketua beserta anggotanya akan memberikan sanksi kepada perangkat desa yang menyalahgunakan dana desa berupa teguran kekeluargaan dan apabila yang bersangkutan tidak mendengarkan maka

akan di laporkan ke camat atau bupati. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi Badan Permusyawaratan Desa tersebut.

5.2. Saran

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Proses Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat Berdasarkan hasil pembahasan, peneliti kemudian memberikan saran sebagai berikut:

1. Di upayakan agar BPD lebih aktif lagi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Moteng khususnya dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Moteng. Hal tersebut tidak hanya BPD dan perangkat Desa yang mengetahuinya di harapkan diketahui oleh masyarakat sehingga semua ikut aktif terlibat.
2. BPD perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan kepala desa agar dapat menjalin kemitraan yang lebih baik. Misalnya, rapat harus lebih sering diadakan selama kegiatan bersama untuk memastikan bahwa dana desa tidak disalahgunakan.
3. Di harapkan semua anggota BPD mengadakan rapat dengan warga tiap satu bulan sekali di Desa Moteng, tidak hanya ketua BPD saja agar semua anggota membahas semua permasalahan yang ada di Desa Moteng.
4. Bagi masyarakat Desa Moteng mempertahankan/meningkatkan partisipasi mereka dalam setiap musyawarah desa yang diadakan untuk mendukung

pemerintah desa khususnya BPD agar tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Moteng dapat terwujud.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M, A Irawan, And P Pariyati. 2018. “Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Mapane Tambu Kecamatan Balaesang.” *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Chairunnisah, Reni, S Km, And Politeknik Medica Farma Husada Mataram. 2021. *Teori Sumber Daya Manusia. Kinerja Karyawan*. [Http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/40781/1/Kinerja Karyawan 2 Cetak.Pdf#Page=38](http://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/40781/1/Kinerja_Karyawan_2_Cetak.Pdf#Page=38).
- Demmaraya, Demmaraya, Abdul Latief, And Dermawan Dermawan. 2020. “Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Ulumambi Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya Di Era Otonomi Daerah.” *Journal Peqguruang: Conference Series 2 (2)*. Doi:10.35329/Jp.V2i2.1545.
- Elviandri, And Indra Perdana. 2021. “Pembentukan Peraturan Desa (Perdes): Tinjauan Hubungan Kewenangan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd).” *Journal Equitable 6 (1)*. Doi:10.37859/Jeq.V6i1.2679.
- Handayani, Yusrina. 2021. “Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia 6 (1)*. Doi:10.36418/Syntax-Literate.V6i1.2079.
- Istiqomah, Siti. 2015. “Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa.” *Kebijakan Dan Manajemen Publik 3 (1)*.
- Kembuan, Kezia Tirsa, Johny Lumolos, And Ismail Sumampow. 2017. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Kopiwangker Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Eksekutif 1 Nomor 1*.
- Kriyantono. 2014. *Teknik Praktis Riset Komunikasi. 1st Ed. Jakarta: Kencana*. https://books.google.co.id/books?id=Gi9adwaaqbaj&printsec=frontcover&dq=Gi9adwaaqbaj&hl=id&sa=X&ved=0ahukewish6y64_Xnahuzvh0khzl-Aauq6aeikdaa#V=Onepage&Q&F=False.
- Lestanata, Y., & Zitri, I. (2020). *Optimalisasi Sektor Pariwisata Pulau Kenawa Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades)*. *Journal Of Governance And Local Politics (Jglp)*, 2(1), 25-47.
- Lestari, Yuni, Khusnatul Zulfa Wafirotin, And Dwiati Marsiwi. 2018. “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) Di Desa Duwet Kecamatan Bendo Kabupaten

- Magetan Tahun 2015 Dan Tahun 2016.” *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi 2 (1)*. Doi:10.24269/Iso.V2i1.129.
- Mardawani, Mardawani, Agnesia Hartini, And Natalia Natalia. 2021. “*Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa Empaka Kebiau Raya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.*” *Jurnal Pekan : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 6 (1)*. Doi:10.31932/Jpk.V6i1.1162.
- Maslikan, Maslikan, And Aldimas Jimantoro. 2021. “*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*” *Jurnal Keadilan Hukum 1 (2)*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia. 2013. “*Peraturan Menteri Desa.*” *Journal Of Chemical Information And Modeling*. Doi:10.1017/Cbo9781107415324.004.
- Perdana, K A, N I K Sinarwati, 2017. “*Perilaku Legislatif Badan Permusyawaratan Desa Dalam Praktik Penganggaran Sektor Publik (Apbdes) Desa Subuk’.*” *Jimat (Jurnal*
- Rodhiyah, Siti, And Muhammad Harir. 2015. “*Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Krandon Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.*” *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. Ii.
- Saiful. 2014. “*Eksistensi Peraturan Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.*” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 2 (6)*.
- Saragi, Junedi, Irwan Nasution, And Walid Musthafa. 2017. “*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Pengawasan Di Desa Marihat Dolok Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.*” *Perspektif 6 (1)*.
- Setyaningrum, Christine Ayu, And Fifiana Wisnaeni. 2019. “*Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1 (2)*. Doi:10.14710/Jphi.V1i2.158-170.
- Simbolon, Hamonangan Alamsyah, And Walid Mustafa Sembiring. 2015. “*Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*” *Jppuma: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Uma 3 (2)*.
- Sugiyono. 2015. “*Sugiyono, Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1.*” *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D.*

Wibowo. 2016. *“Manajemen Kinerja – Wibowo.”* Buku Edisi 5.

Zitri, I., Rifaid, R., Darmansyah, D., Hadi, A., & Subandi, A. (2022). *Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.* Transformasi: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat, 2(2), 125-131.

Zitri, I., Rosiastawa, A., & Hadi, A. (2023). *Mencapai Target Sustainable Development Goals (Sdg's) Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021.* Journal Of Social And Policy Issues, 41-45.

Regulasi

UUD. 1945.

UU Tentang Desa. 2014.

Pemerintah Desa Moteng. 2021. *“Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Desa.”*

Pemerintah Desa Moteng. 2022. *“Anggota BPD Berdasarkan Tingkat Pendidikan.”*

Pemerintah Desa Moteng. 2022. *“Penerima Bantuan BLT Dan BNPT Desa Moteng Periode VI (Enam).”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. *“Tentang Badan Permusyawaratan Desa.”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. *“Tentang Badan Permusyawaratan Desa.”*

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2016. *“Tentang Kewenangan Desa.”*

DOKUMENTASI



